

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 H dijelaskan bahwa tempat tinggal dan lingkungan yang layak adalah hak bagi setiap orang. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat dan juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Rumah memiliki fungsi yang sangat penting bagi setiap individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Rumah selain sebagai kebutuhan dasar juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, peningkatan kualitas generasi yang akan datang dan persemaian budaya atau sistem nilai¹.

Salah satu wujud kesejahteraan masyarakat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak bermartabat dan terjangkau antara lain dengan melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang sehat dan aman. Disamping itu jumlah masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia masih cukup besar, yang menyebabkan banyak tempat tinggal warga yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kemiskinan yang menjadi masalah besar di Indonesia, Menurut BPS dan Departemen Sosial (2002)

¹ Roebyanto, Haryati, & Unayah, Nunung, 2014, Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat, Vol. 4, No. 1

kemiskinan didefinisikan sebagai “ketidakmampuan individu dalam memahami kebutuhndasar minimal untuk hidup layak”. Permasalahan permukiman dan perumahan juga disebut sebagai salah satu hal yang dapat digunakan dalam menetapkan standar kemiskinan, selain itu penduduk miskin menempati wilayah permukiman kumuh, hingga saat ini, masalah permukiman kumuh pun kian menjadi sorotan dunia.

Pemahaman mengenai kemiskinan bukan sekedar kondisi dimana seseorang tidak mampu mencukupikebutuhan material dasar yang dilihat dari tempat tinggal, namun mencakup rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, tidak memiliki pekerjaan tetap, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, tidak adanya jaminan masa depan, ketidakmampuan menyalurkan aspirasi, dan ketersisihan dalam peranan sosial. Karakteristik penduduk miskin biasa ditemui di wilayah perdesaan salah satunya adalah di wilayah Kabupaten Madiun yang mayoritas masyarakatnya bermata pencarian petani dan pedagang.

Kabupaten Madiun dengan kondisi geografis yang berbeda-beda di setiap wilayah antara perbukitan dari rangkaian pegunungan Kendeng, dataran tinggi, dataran rendah dan begelombang, serta pegunungan dari kompleks Gunung Wilis dan Gunung Liman yang memiliki potensi menonjol di pertanian, perkebunan dan produk hutan tidak luput dari permasalahan kemiskinan. Dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan sasaran langsung kepada masyarakat miskin yang berada pada tingkat kemiskinan yang masuk dalam data Badan Pusat Statistik (BPS). Berikut merupakan data jumlah

penduduk miskin di Kabupaten Madiun tahun 2012-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Perbandingan Jumlah Penduduk miskin Kabupaten Madiun

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
2009	642.638	105.650	16,44
2010	663.479	102.302	15,45
2011	666.306	95.843	14,38
2012	669.088	91.779	13,70
2013	671.883	83.698	12,45
2014	673.988	81.200	12,04
2015	676.087	84.740	12,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Madiun setiap tahun mengalami perubahan. Pada tahun 2009 sampai tahun 2014 memang mulai mengalami penurunan. Namun pada tahun 2015 angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 84.740 jiwa, atau dengan persentase 12,04% di tahun 2014 menjadi 12,54% di tahun 2015. Maka hal ini dapat dikatakan perkembangan jumlah penduduk miskin Di Kabupaten Madiun mengalami Fluktuatif. Hal itu yang perlu diwaspadai dan semestinya menjadi bahan evaluasi pemerintah Kabupaten Madiun agar di tahun

mendatang tingkat kemiskinan di Kabupaten Madiun dapat ditangani dengan maksimal.

Demi mengatasi permasalahan kemiskinan, pemerintah telah melakukan berbagai program untuk menanggulangnya. Bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga masyarakat miskin, rumah hanyalah sebagai tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakannya dilihat dari sisi fisik, mental dan sosial. Selain itu, hal ini bisa terjadi karena ekonomi yang kurang baik untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni.

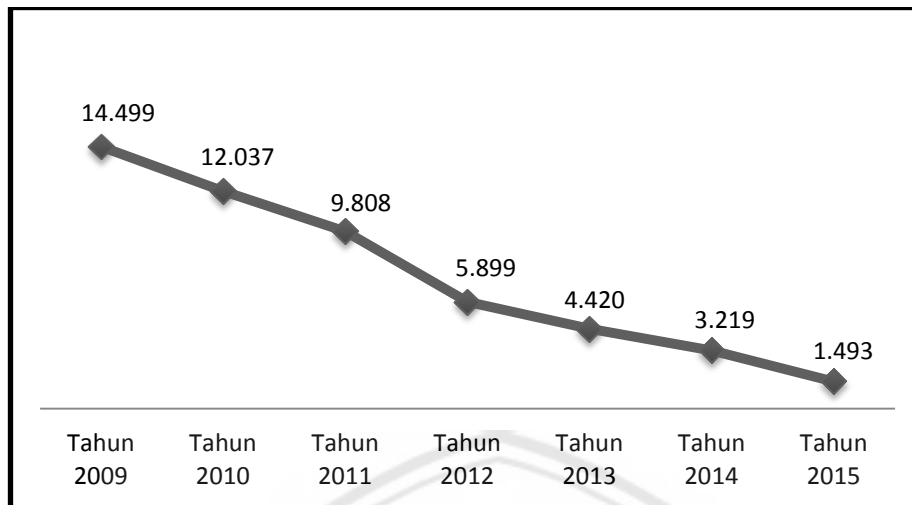
Pada dasarnya penyediaan tempat tinggal atau rumah di Indonesia adalah kewajiban perseorangan, negara dalam hal ini membantu akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar perumahannya secara adil dan merata. Dalam rangka peningkatan salah satu hak-hak dasar masyarakat miskin dan penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Madiun khususnya dibidang perumahan yang layak, maka Pemerintah Kabupaten Madiun memberikan Program perbaikan rumah yang tak layak huni (RTLH) dengan pemberian bantuan atau stimulan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dan selaras dengan visi Kabupaten Madiun yaitu **“Kabupaten Madiun Lebih Sejahtera Tahun 2018”** sebagai perwujudan bahwa Pemerintah Kabupaten Madiun mempunyai komitmen dalam upaya penanggulangan RTLH yang dimaksud yaitu telah diterbitkannya

Peraturan Bupati Madiun Nomor: 6 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Madiun, Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45 / KPTS / 402.031/2012 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Madiun.

Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Madiun Hadir sebagai salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta memperkuat penyediaan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat miskin di Kabupaten Madiun. Program ini bersifat stimulan sehingga diharapkan dapat mendorong kemauan keluarga miskin penerima bantuan untuk bersama-sama keluarga penerima bantuan yang lainnya bergotong royong memperbaiki rumah dengan dibantu juga oleh masyarakat sekitar. Tentunya keterlibatan ini juga sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Karena masing-masing lintas sektor terkait yang bertanggungjawab dalam upaya kelancaran dan pencapaian tujuan. Partisipasi masyarakat berupa gotong royong juga tak kalah penting dalam pelaksanaan kegiatan ini mengingat pengalokasian program ini juga untuk keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Grafik berikut yang menunjukkan data jumlah penduduk dengan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) mulai tahun 2009 hingga tahun 2015, dimana di tahun 2009 merupakan awal dari pemerintah melakukan survei dan pendataan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH).



Gambar 1. 1 Grafik Jumlah (RTLH) Kabupaten Madiun

Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun 2016

Sejauh ini dalam pelaksanaan program yang sudah berjalan hampir 6 tahun Pemerintah Kabupaten Madiun berdasarkan pada *database* yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun yang dilakukan survei di tahun 2009 tercatat 14.499 unit di berbagai kecamatan di Kabupaten Madiun yang masih menempati rumah tidak layak huni, yang hingga tahun 2017 baru dilakukan pendataan kembali mengingat target penyelesaian program pada akhir tahun 2017. Dapat dilihat pada grafik diatas bahwa setiap tahunnya terjadi penurunan jumlah rumah yang signifikan. Hal ini merupakan bentuk dari konsistensi pada setiap sasaran dan Pemerintah kabupaten Madiun berupaya untuk meningkatkan pembangunan.²

Bagi masyarakat yang mendapatkan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ini juga tidak serta merta mendapatkannya begitu saja, kelompok

²Wawancara bersama ibu Titik Suyati selaku Kabid Sosial Sosial Dan Budaya Bappeda Kabupaten Madiun pada tanggal 27 Maret 2017

sasaran program rehabilitasi RTLH adalah masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni. Kriteria Umum rumah tidak layak huni ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Madiun ialah:³

1. Memiliki KTP/identitas diri yang berlaku;
2. Kepala keluarga/ anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
3. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti zakat;
4. Tidak memiliki asset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati;
5. Memiliki rumah atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dari kelurahan/ desa.

Dari kriteria Umum tersebut dilakukan oleh Bappeda sebagai koordinator administrasi Program Bantuan Perbaikan RTLH di Kabupaten Madiun, setelah itu Dinas Pu selaku Tim Pelaksana Program tersebut akan melakukan identifikasi berdasarkan Kriteria Khusus, dari sini dapat dilihat bahwasannya dalam

³ Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan RTLH Bab III Pasal 6

pelaksanaan tersebut dilakukan dengan berbagai tahapan demi suksesnya program tersebut.

Program ini telah berjalanselama hampir 8 tahun, namun tidak terlepas dari hambatan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan program ini. Adapun persoalan yang berkenaan dengan Program Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RTLH) selama ini yaitu: *Pertama*, sejauh mana bantuan tersebut tepat sasaran atau kelayakan penerima bantuan (kevalidan). *Kedua*, Kurangnya Sumber daya, swadaya masyarakat di beberapa wilayah di Kabupaten Madiun masih terbilang rendah atau tenaga kelompok kerja. Tingkat prioritas yang masih dipertanyakan artinya pendataan dan penetapan sasaran dari program ini menjadi sangat penting, hal itu dapat mempengaruhi keberhasilan Program tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana **“Implementasi Kebijakan Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Madiun.”** untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial dalam penanganan kemiskinan dari, serta faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program tersebut.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah seperti yang dipaparkan diatas maka ada beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin Kabupaten Madiun?

2. Apa saja Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan tujuan:

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui apa saja Persoalan yang dihadapi dalam Implementasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan di bidang sosial, khususnya mengenai Implementasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin Kabupaten Madiun.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, kiranya penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai Bahan Rekomendasi dan Pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Madiun dan instansi yang terkait Implementasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat dapat

memberikan informasi terkait Program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Madiun.dan faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut.

E. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan pernyataan yang mengartikan atau memberi makna suatu konsep istilah tertentu. Penggambaran secara umum dan menyeluruh yang menyiratkan maksud dan konsep atau istilah tersebut bersifat konstruktif, formal dan mempunyai pengertian yang abstrak.⁴Berikut beberapa konsep yang dirumuskan dari tema penelitian ini:

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut W.I Jenkins, (1978)merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi, dan keputusan yang diambil merupakan kewenangan dari para aktor tersebut⁵.

Dalam Tahapan kebijakan publik menurut William Dunn (1995) adalah sebagai berikut: 1) Penyusunan Agenda; 2) Formulasi Kebijakan; 3) Adopsi/Legitimasi; 4) Implementasi Kebijakan; 5) Penilaian/Evaluasi Kebijakan⁶.

⁴ Alimul Hidayat, Aziz, 2009. *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta, Salemba Medika

⁵ Solichin Abdul Wahab, 2012, *Analisis kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Malang Bumi Aksara, Hal:15

⁶ Sahya Anggara, 2014, *Kebijakan Publik* , Bandung Pustaka setia,Hal:120

2. Implementasi Kebijakan

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai tujuan dan sasaran tertentu, dimana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan.

Implementasi kebijakan menurut Budi Winarno merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan⁷. Sedangkan menurut Meter dan Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan⁸.

Udoji dalam Agustino⁹ mengemukakan bahwa dalam pendekatan model *top down*, merupakan pendekatan implementasi kebijakan publik yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan

⁷ Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo. Hal:101

⁸ Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara. Hal:64.

⁹ Agustino, Leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta, 2008. Hal:140.

harus dilaksanakan oleh administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Selanjutnya menurut Abdul Wahab pendekatan *top down* selalu diawali dengan keputusan kebijakan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah (pusat)¹⁰.

Kebijakan pemberian bantuan perbaikan (RTLH) di Kabupaten Madiun merupakan kebijakan yang bersifat *top down* karena dalam hal ini sumber dana berasal dari APBD dan masyarakat tidak berkontribusi secara langsung dalam menetapkan kebijakan hanya pada saat proses kebijakan tersebut berlangsung yaitu pada saat proses pembangunan berlangsung.

3. Masyarakat Miskin

Menurut Ritonga mendefinisikan kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak¹¹.

Sedangkan menurut Suparlan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan

¹⁰ Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012. Hal:163

¹¹ Ritonga, Abdurrahman dkk. 2003. *Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin¹².

Dari beberapa pendapat para ahli yang dijelaskan diatas, maka dapat ditarik sebuah pemahaman yakni persoalan dan masalah kemiskinan sesungguhnya selalu adanya keterkaitan dengan kerentanan dan juga ketidakberdayaan. Dan berbicara mengenai kerentanan yang ada pada orang miskin, biasanya disebabkan karena orang miskin dihadapkan dengan kondisi yang lemah, tidak mempunyai daya kemampuan yang cukup dibanyak bidang dan berbagai bidang, dan kemudian secara ekonomi dibarengi oleh kemiskinan pada tingkat pendidikan, sedikit ilmu/pengetahuan/wawasan, tidak memiliki keberdayaan, dan serta tidak memiliki kekuasaan.

¹² Suparlan, Parsudi. 2004. *Masyarakat dan kebudayaan Perkotaan: Perspektif Antropologi perkotaan*. Jakarta. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu kepolisian.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007) didalam suharto adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi¹³. Maka dalam hal ini keterlibatan atau partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Program Perbaikan RTLH sangatlah dibutuhkan

5. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Pada dasarnya Rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. (UU No.4 thn 1992 tentang Perumahan dan Permukiman) Perumahan dan permukiman tidak hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan kehidupan semata-mata, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, dan menampakkan jati diri. Dengan kata lain tidak saja mencakup aspek fisik saja melainkan mental dan sosial.

Pemberian bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada dasarnya merupakan upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran/renovasi)

¹³Suharto, Edi, 2014, Analisis Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, Hal:74.

sehingga tercipta kondisi rumah yang layak bukan hanya sebagai tempat tinggal saja, tetapi rumah juga tempat membentuk suatu keluarga dan sebagai wahana para orang tua mendidik anak-anaknya serta diharapkan tercapai ketahanan keluarga

Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu program dari Pemerintah Kabupaten Madiun yaitu Peraturan Bupati Madiun No. 6 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin di Kabupaten Madiun dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan sebagai upaya memberikan perlindungan pada keluarga miskin guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat miskin khususnya.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati ketika melakukan pengukuran secara cermat terhadap objek atau fenomena dengan menggunakan parameter yang jelas¹⁴. Berikut merupakan Definisi Operasional dari penelitian ini :

1. Implementasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni RTLH Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Madiun
 - a) Penyusunan Agenda program RTLH
 - b) Isi Kebijakan Program RTLH

¹⁴ Alimul Hidayat, Aziz, 2009. *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta, Salemba Medika

- c) SDM Pelaksana
 - d) Fasilitas sarana dan Prasarana
 - e) Evaluasi Program RTLH
 - f) Partisipasi Masyarakat dalam Program RTLH
2. Kendala dalam Pelaksanaan Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Miskin

E. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang tersebar, kemudian dikonstruksikan dalam suatu tema yang memiliki makna yang lebih mudah dipahami¹⁵. Berikut uraian dari metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, Jenis Penelitian yang peneliti gunakan ialah Penelitian Deskriptif, yang menggunakan pendekatan kualitatif. Mengarah pada pemberian data secara sistematis dan akurat terkait kondisi di lapangan¹⁶. Melalui penelitian Deskriptif peneliti juga bermaksud untuk memberikan gambaran terhadap fenomena sosial yang terjadi, menjelaskan berbagai hubungan/kolerasi yang terbentuk, serta dapat memberikan makna atau implikasi pada suatu permasalahan yang

¹⁵ Sugiono, 2015, *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development*, Bandung, Alfabeta, Hal:15

¹⁶ Zuriyah, Nurul 2006, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-aplikasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, Hal:47

sedang diteliti.¹⁷ Bogda dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹⁸.

Penelitian ini mencoba mengetahui dengan jelas dengan terperinci mengenai Implementasi Kebijakan Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi masyarakat Miskin Untuk Meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat. Dengan menggunakan penelitian deskriptif, maka data dan informasi yang diperoleh mengenai keadaan yang sedang berlangsung dari subyek penelitian akan lebih kaya dan beragam. Karena dengan tujuan membuat deskripsi dan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki¹⁹.

2. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang menjadi sasaran penelitian guna memperoleh informasi terkait topik yang diteliti. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan purposive sampling yang didasarkan pada tujuan atau keperluan yang telah ditentukan dengan kriteria tertentu. *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan sehingga mempermudah peneliti

¹⁷ Masyhuri & M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Malang Refika Aditama, Hal:34

¹⁸ Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. Hal: 9

¹⁹ Conveo G. Cervilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta ; Universitas Indonesia, 1993, Hal:73

menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti²⁰. Subyek penelitian ini adalah pihak-pihak terkait yang paham dan menjadi sasaran dari Implementasi Kebijakan Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi masyarakat Miskin Untuk Meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun subyek dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Madiun.
2. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun.
3. Camat Kabupaten Madiun
4. Pemerintah Desa, Kabupaten Madiun.
5. Penerima Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

3. Sumber Data

Sumber Data pada Penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepada sumber sasaran atau subyek penelitian secara langsung di lapangan. Dalam hal ini sumber datanya dengan melakukan teknik wawancara langsung kepada orang-orang yang dianggap mengetahui dan dapat di percaya untuk menjadi sumber data atau informasi yang dapat dipercaya untuk menjadi sumber

²⁰ Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, Hal:96

data atau informasi yang dapat diberikan sejumlah informasi yang dibutuhkan sebagai data pelengkap penelitian ini²¹.

Peneliti akan menanyakan langsung sejauhmana Implementasi KebijakanProgram Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin. yang ada di Kabupaten Madiun. Peneliti juga akan menanyakan langsung apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan kebalikan dari data primer, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder digunakan sebagai pendukung dalam menguatkan penelitian. Data yang dimaksud yaitu data yang diperoleh melalui perantara seperti informasi yang terdapat dalam buku, jurnal, surat edaran, salinan peraturan perundang-undangan, profil instansi atau lembaga pihak-pihak terkait yang paham dan menjadi sasaran dari Implementasi KebijakanProgram Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi masyarakat Miskin.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menerapkan metode diajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada sumber data dan data yang diperoleh dalam bentuk teks dan

²¹ Meleong, Lexy. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja rosdakarya.

gambar. Maka cara menumpulkan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan cara pengamatan terhadap obyek kajian. Pemulihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris²². Observasi dilakukan secara langsung mengenai Implementasi Kebijakan Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin Untuk Meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber guna mendapatkan informasi. Adapun wawancara yang dilaksanakan bersifat tak terstruktur dimana pertanyaan yang diajukan bersifat bebas dan hanya berpedoman pada garis-garis besar permasalahan²³. Dengan Demikian pertanyaan dapat muncul sebagai timbal balik dari keterangan yang telah diberikan oleh informan, sehingga diharapkan dapat memunculkan temuan ataupun gagasan dalam penelitian. Adapun

²² Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia, Bogor. Hal:82

²³ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2008, Hal:9

narasumber dalam wawancara tersebut ialah subyek penelitian yang telah disebutkan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Metode dokumenter ialah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis²⁴. Data Historis yang dimaksud ialah data yang kegunaannya bertahan lama dari waktu ke waktu sehingga menjadi bukti akurat penelitian. Hasil dari dokumentasi dapat berupa catatan penelitian, gambar-gambar penelitian, surat-surat, hingga salinan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Madiun Khususnya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Madiun yang beralamat di Jl. Mt. Haryono, Purwosari, Wonoasri, Madiun, Jawa Timur dan di Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya berlokasi di Jl. Raya P. Sudirman No.65, Krajan, Mejayan, Madiun, Jawa Timur.

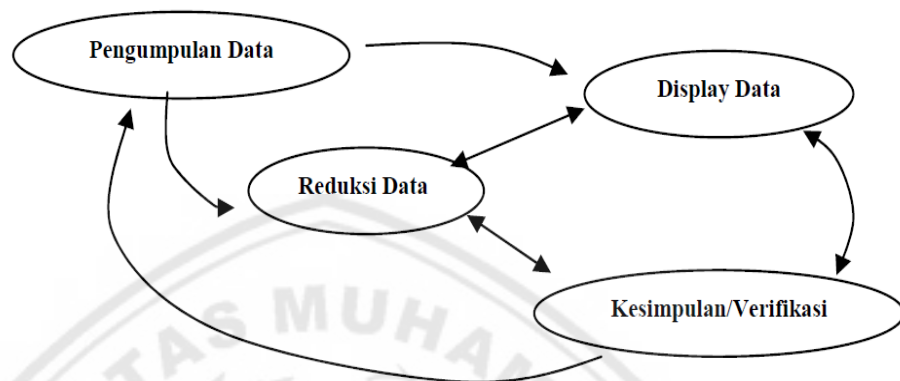
6. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif Miles dan Huberman dalam Sugiyono²⁵ melalui pengumpulan data, penyederhanaan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Dari data tersebut

²⁴ Ibid, Hal:121

²⁵ Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

akan mengungkapkan peristiwa sebagaimana adanya dalam bentuk kalimat.



Gambar 1. 2 Siklus Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Interaktif

Sumber: Sugiyono, 2010

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu : *Pertama* adalah pengumpulan data, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara (yang dilakukan kepada subyek penelitian). Data yang dikumpulka dalam ahap ini berfokus pada data Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin

Kedua adalah reduksi data yaitu memilih hal-hal yang pokok, dalam tahap ini data yang telah diperoleh (data primer maupun data sekunder) dapat berupa tabel, gambar, hasil wawancara. Hasil observasi dan hasil studi dokumentasi yang kemudian diubah menjadi bentuk tulisan dan dikategorikan sesuai fokus bahasan masing-masing. Setelah itu dilakukan reduksi atau memilah data yang telah dikumpulkan lalu

menggabungkan atau menghubungkan antar data yang telah dikumpulkan lalu menggabungkan atau menghubungkan antar data yang telah dipilah. Dengan demikian data yang telah direduksi akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menemui data-data yang sesuai dengan pokok bahasan. Selain dari pada itu dapat mempermudah proses pengumpula data selanjutnya.

Tahap *Ketiga* adalah *display* data, pada tahap ini peneliti akan menganalisis, menguraikan, memahami dan menggabarkan kembali data-data yang telah diperoleh dengan bahasa peneliti agar lebih mudah dipahami. Pada tahap ini data-data yang telah diperoleh telah tersusun ke dalam klasifikasi/kelompok masing masing kemudian dideskripsikan, dan mencari kolerasi atau hubungan dari beberapa data sehingga diperoleh data baru yang merupakan hasil dari kolerasi dan kompolasi dai kedua klasifikasi data sebelumnya.

Keempat yaitu yang terakhir adalah membuat kesimpulan sementara dari keseluruhan data yang telah diperoleh, yaitu bagaimana implementasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin²⁶.

²⁶Ibid, Hal:283